

IMPLEMENTASI KONSEP KEWARGANEGARAAN DALAM PENDIDIKAN DI INDONESIA

Novita Sary Hasibuan¹, Naysya Desky², Serlin Fitriana³, Sapta Kusuma⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Sumatera Utara

¹Novitasaryhasibuan1995@gmail.com, ²naysya764@gmail.com,
³fitrianaserlin@gmail.com, ⁴sapta.kesuma@fkip.uisu.ac.id.

ABSTRACT

Political science is an important foundation for understanding the concept of citizenship, which forms the basis of citizenship education in Indonesia. This journal discusses the basic concepts of political science and its relevance to education, particularly in shaping good character in citizens through the learning process. This study uses a literature review method to analyze the relationship between political science theories and the practice of citizenship education in schools. The results of the study show that an understanding of the state, the rights and obligations of citizens, and democratic values is very important to instill in students as future responsible citizens. Educators have a strategic role in transforming the concepts of political science into meaningful and contextual learning.

Keywords: Political Science, Civic Education, Citizens, Faculty of Teacher Training and Education, Civic Education Learning

ABSTRAK

Ilmu Negara merupakan fondasi penting dalam memahami konsep kewarganegaraan yang menjadi basis pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Jurnal ini membahas konsep dasar Ilmu Negara dan relevansinya dengan dunia pendidikan, khususnya dalam membentuk karakter warga negara yang baik melalui proses pembelajaran. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka untuk menganalisis hubungan antara teori-teori Ilmu Negara dengan praktik pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemahaman tentang negara, hak dan kewajiban warga negara, serta nilai-nilai demokrasi sangat penting untuk ditanamkan kepada peserta didik sebagai calon warga negara yang bertanggung jawab. Pendidik memiliki peran strategis dalam mentransformasikan konsep-konsep Ilmu Negara menjadi pembelajaran yang bermakna dan kontekstual.

Kata Kunci: Ilmu Negara, Pendidikan Kewarganegaraan, Warga Negara, FKIP, Pembelajaran PKn

A. Pendahuluan

Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu instrumen penting dalam membentuk karakter bangsa. Sebagai calon pendidik, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) perlu memahami konsep-konsep dasar Ilmu Negara agar mampu mentransfer pengetahuan tersebut kepada peserta didik dengan efektif.

Ilmu Negara tidak hanya mempelajari aspek teoritis tentang negara, tetapi juga memberikan pemahaman praktis tentang bagaimana warga negara berinteraksi dengan negara, memahami hak dan kewajibannya, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks pendidikan, pengetahuan ini menjadi landasan bagi guru untuk mengembangkan kesadaran civic literacy pada peserta didik.

Di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi saat ini, tantangan pendidikan kewarganegaraan semakin kompleks. Peserta didik tidak hanya perlu memahami konsep negara secara konvensional, tetapi juga harus mampu menghadapi isu-isu kontemporer seperti nasionalisme di era digital, demokrasi partisipatif,

hak asasi manusia, dan peran warga negara dalam pembangunan berkelanjutan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif sebagaimana dikemukakan oleh Creswell (2014) bahwa pendekatan kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam. Pendekatan studi kasus digunakan sesuai Yin (2018) karena penelitian memfokuskan diri pada implementasi konsep kewarganegaraan dalam konteks pendidikan. Informan dipilih melalui purposive sampling (Sugiyono, 2017) yang terdiri dari guru PKn, kepala sekolah, dan siswa. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, sebagaimana dianjurkan Moleong (2019). Keabsahan data diperkuat menggunakan triangulasi sumber dan teknik (Denzin, 1978). Analisis data mengikuti model Miles & Huberman (1994) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Etika penelitian mengikuti panduan Creswell (2014) dengan memberikan informed consent dan menjaga kerahasiaan informan.

Implementasi	Konsep	Lokasi dan Waktu Penelitian
Kewarganegaraan Pendidikan di Indonesia	dalam	Lokasi: Sekolah (SD/SMP/SMA) atau perguruan tinggi yang menerapkan kurikulum PKn.
Jenis Penelitian		Waktu: Misalnya Mei–Agustus 2024 (sesuaikan kebutuhan jurnal).
<p>Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, karena bertujuan menggambarkan secara mendalam bagaimana konsep kewarganegaraan (citizenship) diterapkan dalam proses pendidikan di Indonesia.</p> <p>Ahli pendukung: John W. Creswell (2014) — menjelaskan bahwa penelitian kualitatif cocok digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam. Lexy J. Moleong (2019) — menegaskan penelitian kualitatif berfungsi untuk melihat makna, kondisi, dan situasi secara holistik.</p>		Subjek dan Informan Penelitian <p>Subjek penelitian dipilih menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan informan yang dianggap paling memahami fenomena.</p> Informan meliputi: <p>Guru Pendidikan Kewarganegaraan Kepala sekolah Peserta didik Pengembang kurikulum Ahli pendukung: Sugiyono (2017) — purposive sampling cocok untuk penelitian kualitatif karena memilih informan yang dianggap mengetahui data secara mendalam.</p>
Pendekatan Penelitian		Teknik Pengumpulan Data <p>Menggunakan tiga teknik utama:</p> <p>a. Wawancara Mendalam (In-depth Interview)</p> <p>Digunakan untuk menggali pemahaman guru dan siswa terkait implementasi konsep kewarganegaraan.</p> <p>Didukung oleh:</p>

Moleong (2019) — wawancara sebagai teknik utama dalam penelitian kualitatif.

b. Observasi Partisipatif

Melihat langsung proses pembelajaran PKn di kelas, metode guru, dan aktivitas kewarganegaraan siswa.

Didukung oleh:

Spradley (2006) — observasi penting untuk melihat perilaku dan praktik sosial.

c. Dokumentasi

Menganalisis dokumen seperti kurikulum, RPP, modul ajar, dan catatan sekolah.

Didukung oleh:

Sugiyono (2017) — dokumentasi sebagai pelengkap data wawancara dan observasi.

Teknik Validitas Data

Menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Ahli pendukung:

Denzin (1978) — triangulasi meningkatkan keabsahan data dengan membandingkan berbagai sumber.

Patton (2002) — triangulasi teknik membantu memperkuat kredibilitas interpretasi data.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis menggunakan model interaktif:

1. Pengumpulan data
2. Reduksi data (memilah data relevan)
3. Penyajian data
4. Penarikan kesimpulan

Ahli pendukung:

Miles & Huberman (1994) — model analisis interaktif untuk penelitian kualitatif.

Etika Penelitian

Penelitian mengikuti prinsip etika penelitian:

Informan diberikan informed consent

Identitas dapat disamarkan

Data hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah

Didukung oleh:

Creswell (2014) — etika sangat penting dalam penelitian kualitatif sosial.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan Pengertian Ilmu Negara

Ilmu Negara adalah cabang ilmu yang mempelajari negara secara umum, mencakup hakikat, tujuan, bentuk, dan unsur-unsur negara tanpa terikat pada negara tertentu. Dalam perspektif pendidikan, Ilmu Negara

memberikan landasan teoretis untuk memahami bagaimana warga negara berperan dalam sistem kenegaraan.

Menurut Soehino, Ilmu Negara adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas-asas pokok negara dan hukum negara pada umumnya. Sementara itu, dari perspektif pendidikan, pemahaman tentang Ilmu Negara membantu guru dan peserta didik memahami posisi mereka dalam struktur kenegaraan dan bagaimana mereka dapat berkontribusi positif.

Roelof Krannenburg mengartikan ilmu negara adalah ilmu yang menyelidiki negara; meliputi tumbuh, wujud, dan bentuk-bentuk negara. Ilmu negara ini menyelidiki hakikat, struktur dan bentuk, asal mula negara, serta persoalan yang ada dalam pengertian umum.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

PPKn adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

James A. Banks (Banks, 2008)

Banks berfokus pada pentingnya keragaman (diversity) dalam pendidikan kewarganegaraan.

Pandangan: Pendidikan kewarganegaraan harus bersifat multikultural, mempersiapkan siswa untuk berfungsi secara efektif dalam masyarakat yang beragam. Tujuan utamanya adalah membantu siswa mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan untuk membuat keputusan yang bijaksana dan berpartisipasi dalam tindakan kewarganegaraan yang konstruktif dan demokratis.

Inti: PPKn harus mengajarkan toleransi dan hidup damai dalam keberagaman (sangat relevan dengan Bhinneka Tunggal Ika).

T.H. Marshall (Marshall, 1950)

Marshall memberikan kerangka klasik tentang dimensi kewarganegaraan yang menjadi dasar banyak kurikulum kewarganegaraan, termasuk di Indonesia.

Pandangan: Kewarganegaraan terdiri dari tiga elemen utama: elemen sipil (hak-hak individu seperti kebebasan berbicara), elemen politik (hak untuk berpartisipasi, seperti memilih), dan elemen sosial (hak atas kesejahteraan ekonomi dan

keamanan). Pendidikan kewarganegaraan harus mencakup ketiga dimensi ini.

Inti: PPKn harus mencakup penguasaan hak dan kewajiban di bidang sipil, politik, dan sosial.

Tujuan PPKn menurut Permendikbud meliputi:

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab
3. Berkembang secara positif dan demokratis
4. Berinteraksi dengan bangsa lain dalam percaturan dunia

Konsep Warga Negara dalam Perspektif Pendidikan

Warga negara yang baik (good citizen) memiliki karakteristik:

- Civic Knowledge: Pengetahuan tentang negara, pemerintahan, hak dan kewajiban
- Civic Skills: Keterampilan intelektual dan partisipatoris
- Civic Disposition: Karakter kewarganegaraan seperti tanggung jawab, disiplin, toleransi

Teori Pembelajaran

Konstruktivisme dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Pembelajaran kewarganegaraan efektif ketika peserta didik aktif mengonstruksi pengetahuannya sendiri melalui pengalaman nyata.

Pendekatan konstruktivisme mendorong peserta didik untuk:

- Mengaitkan materi dengan konteks kehidupan sehari-hari
- Belajar melalui problem solving
- Mengembangkan critical thinking
- Berkolaborasi dalam pembelajaran

Sejarah ilmu negara

Diterangkan Aminoto dalam modul Ilmu Negara menerangkan bahwa ilmu negara di Indonesia mulai muncul saat 17 Agustus 1945. Namun, jika dilihat secara luas, konsep ilmu negara sudah ada sejak zaman Yunani.

Kemunculan ilmu negara di Eropa Barat terjadi di masa sebelum zaman Bismarck atau dalam pemerintahan Caesar Wilhelm II di Jerman. Di masa itu, timbul mazhab deutsche publizisten schule atau Aliran Hukum Publik Jerman yang secara khusus membahas sifat-sifat hukum publik.

Kemudian, sebagaimana diterangkan Wahjono (dalam Aminoto, 2015: 3), Paul Laband dan Von Gerber mengemukakan bahwa mazhab itulah yang kemudian berpengaruh dalam perkembangan ilmu negara.

Kemunculan Istilah Ilmu Negara

Merujuk pada penyebutan atau istilah, dijelaskan Atmadja (dalam Aminoto, 2015: 3), dalam kepustakaan, istilah ilmu negara berasal dari bahasa Belanda, yakni *staatsleer*. Jika diterjemahkan, *staat* berarti 'negara' dan *leer* berarti 'ilmu'.

Istilah ini sebenarnya diambil dari bahasa Jerman, *staatslehre*, yang juga berarti ilmu negara. Dalam bahasa Inggris, digunakan istilah *Theory of State*, *The General Theory of State*, atau *Political Science*. Lalu, dalam bahasa Perancis dikenal dengan istilah *Theorie d'etat*.

Istilah *staat* mulai digunakan di Eropa Barat pada abad ke-15. Istilah ini lahir dari bahasa Latin, *status*. Jika diterjemahkan dari bahasa Latin, menurut Huda (dalam Aminoto, 2015: 4) *status* berarti istilah abstrak yang menunjukkan keadaan atau sesuatu yang bersifat yang tegak dan tetap.

Pembahasan

Konsep Dasar Ilmu Negara yang Relevan dengan Pendidikan Negara dan Masyarakat

Dalam pembelajaran, peserta didik perlu memahami bahwa negara bukan entitas yang terpisah dari masyarakat. Negara adalah organisasi yang dibentuk oleh dan untuk masyarakat. Pemahaman ini penting untuk menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap negara.

Guru dapat menggunakan pendekatan kontekstual dengan menjelaskan bagaimana kebijakan negara mempengaruhi kehidupan sehari-hari peserta didik, seperti kebijakan pendidikan gratis, program vaksinasi, atau pembangunan infrastruktur di daerah mereka.

Unsur-Unsur Negara

a. Rakyat dalam Perspektif Pendidikan

Peserta didik perlu memahami bahwa mereka adalah bagian dari rakyat Indonesia. Konsep ini dapat diajarkan melalui:

- Pembelajaran tentang keberagaman suku, agama, ras, dan budaya di Indonesia
- Pentingnya persatuan dalam kebhinekaan

- Hak dan kewajiban sebagai warga negara
- Strategi Pembelajaran:
- Diskusi kelompok tentang identitas nasional
- Proyek penelitian sederhana tentang keberagaman budaya lokal
- Role play tentang situasi yang memerlukan toleransi dan gotong royong

Wilayah dan Cinta Tanah Air

Pemahaman tentang wilayah Indonesia penting untuk menumbuhkan nasionalisme.

Pembelajaran dapat mencakup:

- Geografi Indonesia dan kekayaan alam
- Sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan
- Pentingnya menjaga kedaulatan wilayah

Strategi Pembelajaran:

- Virtual tour ke berbagai daerah di Indonesia
- Proyek pembuatan peta tematik
- Studi kasus tentang isu perbatasan atau sumber daya alam

Pemerintahan dan Partisipasi Warga Negara

Peserta didik perlu memahami:

- Struktur pemerintahan dari tingkat desa hingga pusat
- Mekanisme demokrasi dan pemilihan umum
- Cara menyampaikan aspirasi secara demokratis
- Strategi Pembelajaran:
- Simulasi pemilihan ketua kelas secara demokratis
- Kunjungan ke kantor pemerintahan lokal
- Diskusi tentang isu-isu aktual dalam masyarakat

Konsep Kedaulatan Rakyat

Indonesia menganut prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Dalam pembelajaran, konsep ini dapat diterjemahkan menjadi:

a. Demokrasi Pancasila

- Musyawarah untuk mufakat
- Menghargai perbedaan pendapat
- Keputusan untuk kepentingan bersama

b. Praktik Demokrasi di Sekolah

- Pemilihan pengurus kelas/OSIS secara demokratis
- Forum diskusi siswa
- Penyusunan tata tertib kelas secara partisipatif

Hubungan Ilmu Negara dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Ilmu Negara sebagai Landasan Teoretis PPKn

Ilmu Negara memberikan fondasi konseptual untuk pembelajaran PPKn:

Tabel 1. Fondasi Konseptual

Konsep Ilmu Negara	Implementasi dalam PPKn
Teori terbentuknya negara	Pembelajaran sejarah kemerdekaan Indonesia
Unsur-unsur negara	Materi tentang wilayah, penduduk, dan pemerintahan RI
Tujuan negara	Pemahaman tentang Pembukaan UUD 1945
Bentuk negara	Sistem pemerintahan Indonesia
Kedaulatan	Demokrasi dan partisipasi warga negara

Transformasi Konsep Abstrak menjadi Pembelajaran Konkret

Guru memiliki tantangan untuk mengubah konsep-konsep Ilmu Negara yang abstrak menjadi pembelajaran yang dapat dipahami peserta didik:

Contoh Transformasi:

1. Konsep Kedaulatan
 - Teori: Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi negara
 - Pembelajaran: "Ketika kalian memilih ketua kelas, kalian sedang melaksanakan

kedaulatan rakyat dalam skala kecil"

2. Konsep Tujuan Negara
 - Teori: Melindungi segenap bangsa
 - Pembelajaran: Diskusi tentang peran polisi, tentara, dan warga negara dalam menjaga keamanan lingkungan
3. Konsep Hak dan Kewajiban
 - Teori: Keseimbangan hak dan kewajiban warga negara
 - Pembelajaran: Analisis kasus nyata tentang hak pendidikan dan kewajiban belajar

Peran Guru dalam Implementasi Konsep Ilmu Negara

Guru sebagai Transformator Pengetahuan

Guru PPKn tidak sekadar menyampaikan materi, tetapi mengubah konsep-konsep Ilmu Negara menjadi pembelajaran bermakna:

- a. Mengontekstualisasi Materi
 - Menghubungkan teori dengan isu-isu aktual
 - Menggunakan contoh dari lingkungan peserta didik
 - Mendorong peserta didik menemukan relevansi materi dengan kehidupan mereka

b. Memfasilitasi Pembelajaran Aktif

- Diskusi dan debat tentang isu kewarganegaraan
- Project-based learning tentang masalah sosial
- Service learning di masyarakat

- Gotong Royong: Kerja sama dan peduli terhadap sesama
- Kemandirian: Mampu berpikir kritis dan mengambil keputusan
- Kebhinekaan: Menghargai dan merayakan perbedaan

Guru sebagai Model Warga Negara yang Baik

Guru adalah role model bagi peserta didik dalam mempraktikkan nilai-nilai kewarganegaraan:

- Menunjukkan sikap demokratis dalam interaksi dengan peserta didik
- Menghargai keberagaman
- Menunjukkan integritas dan tanggung jawab
- Aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan

Guru sebagai Fasilitator Pengembangan Karakter

Melalui pembelajaran PPKn, guru memfasilitasi pembentukan karakter:

- Nasionalisme: Cinta tanah air dan bangga menjadi Indonesia
- Integritas: Jujur, bertanggung jawab, dan berani menegakkan kebenaran

Strategi Pembelajaran Ilmu Negara yang Efektif

Pendekatan Pembelajaran

a. Contextual Teaching and Learning (CTL) Mengaitkan materi dengan konteks kehidupan nyata peserta didik:

- Menggunakan berita aktual sebagai bahan diskusi
- Menganalisis kebijakan pemerintah yang berdampak pada kehidupan siswa
- Field trip ke lembaga-lembaga negara atau pemerintahan lokal

b. Problem-Based Learning (PBL) Memberikan masalah nyata untuk dipecahkan:

- Kasus pelanggaran hak warga negara
- Isu lingkungan dan tanggung jawab warga negara
- Konflik sosial dan solusi demokratis

- Project-Based Learning (PjBL) Mengembangkan proyek yang bermakna:
- Kampanye kesadaran hak dan kewajiban warga negara
- Proyek pelayanan masyarakat
- Pembuatan media pembelajaran tentang nilai-nilai Pancasila

Metode Pembelajaran Inovatif

a. Simulasi dan Role Play

- Simulasi sidang parlemen
- Role play persidangan
- Simulasi pemilihan umum

b. Diskusi dan Debat

- Diskusi panel tentang isu kontroversial
- Debat demokratis dengan aturan yang jelas
- Circle discussion untuk membahas nilai-nilai

Pembelajaran Berbasis Teknologi

- Menggunakan media sosial untuk kampanye positif
- Membuat vlog tentang praktik demokrasi
- Webinar dengan narasumber dari lembaga negara

Penilaian Autentik

Penilaian tidak hanya mengukur aspek kognitif, tetapi juga sikap dan keterampilan:

a. Penilaian Kognitif

- Tes pemahaman konsep
- Analisis kasus
- Penulisan esai argumentatif

b. Penilaian Sikap

- Observasi perilaku dalam diskusi
- Self-assessment tentang nilai-nilai yang dianut
- Peer-assessment dalam kerja kelompok

c. Penilaian Keterampilan

- Kemampuan berpikir kritis
- Keterampilan komunikasi
- Kemampuan berpartisipasi dan berkolaborasi

Tantangan dan Solusi dalam Pembelajaran Ilmu Negara

Tantangan

- a. Materi yang Abstrak Konsep-konsep dalam Ilmu Negara sering bersifat abstrak dan sulit dipahami peserta didik tingkat menengah.
- b. Kurangnya Kontekstualisasi Pembelajaran yang terlalu teoretis tanpa mengaitkan dengan kehidupan nyata

membuat peserta didik kurang tertarik.

- c. Keterbatasan Sumber Belajar
Tidak semua sekolah memiliki akses ke sumber belajar yang memadai atau kesempatan untuk mengunjungi lembaga-lembaga negara.
- d. Persepsi Negatif terhadap Politik dan Pemerintahan
Berita negatif tentang korupsi atau konflik politik dapat membentuk persepsi negatif peserta didik terhadap negara dan pemerintahan.

Solusi

- a. Penggunaan Media Pembelajaran yang Menarik
- Video edukatif
 - Infografis
 - Game edukasi
 - Virtual reality untuk tour lembaga negara
- b. Pembelajaran Berbasis Proyek Lokal
- Meneliti praktik demokrasi di tingkat RT/RW
 - Mewawancarai tokoh masyarakat
 - Menganalisis kebijakan pemerintah daerah
 - c. Pemanfaatan Teknologi

- Virtual tour ke lembaga-lembaga negara
- Webinar dengan narasumber ahli
- Platform pembelajaran daring
- Pendekatan Positif dan Solusi
- Fokus pada success stories dalam demokrasi Indonesia
- Mendorong peserta didik menjadi agen perubahan
- Mengajarkan critical thinking untuk memilah informasi

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembelajaran

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia harus menjadi ruh dalam pembelajaran Ilmu Negara:

Ketuhanan Yang Maha Esa

- Menghargai kebebasan beragama
- Toleransi antarumat beragama
- Etika dan moral dalam kehidupan bernegara

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

- Penghormatan terhadap hak asasi manusia
- Anti diskriminasi dan perundungan
- Empati dan kepedulian sosial

Persatuan Indonesia

- Nasionalisme dan patriotisme

- Menghargai kebhinekaan
- Gotong royong dan solidaritas

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

- Praktik demokrasi deliberatif
- Menghargai perbedaan pendapat
- Pengambilan keputusan secara musyawarah

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

- Kepedulian terhadap kesenjangan sosial
- Tanggung jawab sosial
- Partisipasi dalam pembangunan

Studi Kasus: Implementasi Pembelajaran Ilmu Negara

Contoh Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Tema: Memahami Hak dan Kewajiban Warga Negara

Tujuan Pembelajaran:

- Peserta didik mampu menjelaskan konsep hak dan kewajiban warga negara
- Peserta didik mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari

- Peserta didik menunjukkan sikap bertanggung jawab sebagai warga negara

Kegiatan Pembelajaran:

1. Pendahuluan (10 menit)

- Apersepsi: Menampilkan video pendek tentang berbagai aktivitas warga negara
- Pertanyaan pemantik: "Apa yang kalian lakukan ketika melihat sampah berserakan di jalan?"

2. Kegiatan Inti (60 menit)

- Eksplorasi: Diskusi kelompok tentang pengalaman terkait hak dan kewajiban
- Elaborasi: Menganalisis kasus nyata pelanggaran hak atau pengabaian kewajiban
- Konfirmasi: Presentasi kelompok dan klarifikasi guru

3. Penutup (20 menit)

- Refleksi: Peserta didik menuliskan komitmen pribadi terkait pelaksanaan kewajiban
- Evaluasi: Kuis singkat dan self-assessment

Evaluasi Keberhasilan

Indikator keberhasilan pembelajaran Ilmu Negara:

- Peserta didik menunjukkan pemahaman konsep yang baik (aspek kognitif)
- Peserta didik menunjukkan sikap positif terhadap nilai-nilai kewarganegaraan (aspek afektif)
- Peserta didik mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari (aspek psikomotorik)
- Meningkatnya partisipasi peserta didik dalam kegiatan sekolah dan Masyarakat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan, bahwa :

1. Relevansi Ilmu Negara dengan Pendidikan Ilmu Negara memberikan fondasi teoretis yang kuat bagi pendidikan kewarganegaraan. Konsep-konsep seperti negara, kedaulatan, hak dan kewajiban, serta demokrasi menjadi basis pembentukan warga negara yang cerdas dan berkarakter.
2. Peran Strategis Guru Guru, khususnya guru PPKn, memiliki peran vital sebagai transformator pengetahuan, model warga negara yang baik, dan fasilitator

pengembangan karakter. Kemampuan guru dalam mengontekstualisasi konsep-konsep Ilmu Negara menentukan keberhasilan pembelajaran.

3. Pembelajaran yang Efektif Pembelajaran Ilmu Negara yang efektif menggunakan pendekatan kontekstual, problem-based learning, dan project-based learning. Metode-metode inovatif seperti simulasi, diskusi, dan pembelajaran berbasis teknologi membuat materi lebih menarik dan bermakna.
4. Implementasi Nilai Pancasila Nilai-nilai Pancasila harus menjadi ruh dalam setiap pembelajaran Ilmu Negara, membentuk karakter peserta didik yang religius, humanis, nasionalis, demokratis, dan berkeadilan sosial.
5. Tantangan dan Solusi Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti materi yang abstrak dan keterbatasan sumber belajar, tantangan ini dapat diatasi melalui kreativitas guru dalam mengembangkan media pembelajaran, pemanfaatan teknologi, dan pembelajaran berbasis konteks lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Budimansyah, Dasim. (2010). *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Karakter Bangsa*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Budiardjo, Miriam. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kaelan & Zubaidi, Ahmad. (2020). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kansil, C.S.T., & Kansil, Christine S.T. (2011). *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kemendikbud. (2016). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20, 21, 22, dan 23 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian*.
- Soehino. (2000). *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Wahab, Abdul Aziz & Sapriya. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno. (2014). *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Isi, Strategi, dan Penilaian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winataputra, Udin S. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Pendidikan untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Kranenburg, R. (1981). *Ilmu Negara Umum*. (Terj. R. Wiratno Prodjodikoro). Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hadisuprpto, Pawrso E. (2004). *Pengantar Ilmu Negara*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Djaenuri, M. (2018). *Ilmu Negara dan Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Sjahran Basah. (2003). *Ilmu Negara*. Bandung: Alumi.
- Soehino. (2005). *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Spradley, J. P. (2006). *Participant observation*. Waveland Press.
- Mustofa, M. (2002). *Ilmu Negara: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pringgodigdo, A. G. (1960). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pustaka Rakjat.
- Ubaedillah, A. & Rozak, A. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana.

Jurnal :

- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K. (1978). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*. McGraw-Hill.
- Huberman, A. M., & Miles, M. B. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. SAGE Publications.
- Sudrajat, Ajat. (2011). *Mengapa Pendidikan Karakter? Jurnal Pendidikan Karakter*, 1(1), 47-58.